

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Berkembangnya negara dalam memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas serta adanya pemberlakuan otonomi daerah yang memberikan dampak positif mengharuskan daerah untuk menggali dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang ada di daerah tersebut. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah juga tentunya sangat mendukung terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Pada tahap awal, pemerintah Provinsi harus mampu mengidentifikasi tiga pilar pengembangan wilayah yang dimilikinya yaitu Potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Teknologi (Mehrtens dan Abdurahman,2007)

Menurut pemikiran ekonomi klasik bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah yang kaya sumber daya alam akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan di daerah yang miskin sumber daya alam. Hingga tingkat tertentu, anggapan ini masih bisa dibenarkan, dalam arti sumber daya alam harus di lihat sebagai modal awal untuk pembangunan yang selanjutnya harus dikembangkan, dan untuk diperlukan faktor-faktor lain, diantaranya yang sangat penting adalah tenaga kerja, belanja modal dan teknologi (Tambunan, 2001). Namun, fakta dilapangan menunjukan bahwa masih banyak daerah yang pertumbuhan ekonominya masih rendah bukan karna tidak mampu mengelola sektor unggulan atau sumber daya alam melainkan disebabkan karena belanja modal yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, belanja modal seharusnya

difokuskan pada proporsi pembelanjaan aset daerah misalnya dalam bentuk pembangunan infrastruktur antara lain Peralatan, Gedung, Jalan Raya, Jembatan dan lain-lain di banding belanja rutin. Selanjutnya tenaga kerja juga mempengaruhi output suatu daerah. Tenaga kerja yang besar akan terbentuk dari jumlah penduduk yang besar namun pertumbuhan penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan minimnya lapangan kerja dapat menyebabkan angka pengangguran semakin meningkat. Persoalan ini perlu dilihat sebagai suatu masalah yang sangat serius di Indonesia khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang terletak di bagian Tenggara Indonesia. Provinsi ini memiliki 21 Kabupaten dan 1 kota medium. Nusa Tenggara Timur sebagai daerah agraria dengan kontribusi pertanian yang dominan sebesar 34,18 persen, kemudian ada sektor-sektor lain yang berkontribusi diantaranya sektor Jasa-jasa 26,50 persen, sektor perdagangan 18,19 persen, Angkutan dan Komunikasi 7,52 persen, Bangunan dan Konstruksi 6,34 persen, ada pula sektor lain yang berkontribusi namun kurang dari 5 persen yaitu Sektor Pertambangan dan penggalian sebesar 1,34 persen, Industri Pengolahan 1,38 persen, Listrik, gas dan air bersih 0,45 persen,

Berdasarkan data yang diperoleh pada Badan Pusat Statistik tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan bahwa PDRB setiap Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
**PDRB Setiap Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2022 (Miliaran Rupiah)**

Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi		
	2020	2021	2022
Sumba Barat	1437.37	1452.22	1499.06
Sumba Timur	3966.20	4009.01	4114.60
Kupang	4754.94	4883.42	5022.10
Timor Tengah Selatan	4769.17	4883.87	5035.91
Timor Tengah Utara	2880.93	2949.05	3031.63
Belu	2968.23	3020.03	3116.23
Alor	1996.04	2045.99	2106.33
Lembata	1162.84	1179.55	1210.16
Flores Timur	3498.47	3522.55	3582.89
Sikka	3305.67	3376.03	3489.82
Ende	4076.21	4162.98	4291.78
Ngada	2310.19	2336.34	2407.71
Manggarai	2991.32	3030.14	3097.18
Rote Ndao	1931.72	1974.99	2045.28
Manggarai Barat	2267.58	2296.74	2391.36
Sumba Tengah	756.61	767.26	787.04
Sumba Barat Daya	2307.21	2355.16	2444.60
Nagekeo	1378.04	1406.19	1450.12
Manggarai Timur	2040.01	2087.11	2165.25
Sabu Raijua	773.18	784.69	808.41
Malaka	1879.14	1915.74	1987.25
Kota Kupang	16351.00	16569.64	17138.22

Sumber: BPS Provinsi NTT tahun 2023

Berdasarkan Tabel 1.1. di atas dapat diketahui bahwa PDRB setiap Kabupaten di Provinsi NTT selama tahun 2020 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan. Meningkatnya PDRB ini disebabkan oleh adanya peningkatan pembangunan disetiap sektor ekonomi sehingga menyebabkan kontribusi setiap sektor ekonomi mengalami peningkatan.

PDRB di provinsi NTT dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah penyerapan akan tenaga kerja. Dimana tingginya kesempatan kerja akan berpengaruh

terhadap pencapaian ekonomi dari suatu daerah. Alasannya, karena kegiatan ekonomi masyarakat ditunjukkan dengan kinerja produksi masyarakat yang biasanya dicerminkan oleh Produk Domestik Bruto, sedangkan untuk daerah yaitu Produk Domestik Regional Bruto, Irawan (2015).

Menurut Todaro (2000) pertumbuhan tenaga kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hellen, dkk (2017) menyimpulkan bahwa penyerapan tenaga kerja secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan data pada BPS provinsi NTT menunjukkan bahwa selama tahun 2020 hingga tahun 2022 jumlah tenaga kerja terus mengalami peningkatan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini

**Tabel 1.2**  
**Tenaga Kerja Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur**  
**Tahun 2020-2022 (Jiwa)**

Kabupaten	Tenaga Kerja		
	2020	2021	2022
Sumba Barat	49.027	50.854	49.532
Sumba Timur	99.897	101.292	112.312
Kupang	188.375	194.451	201.924
Timor Tengah Selatan	216.405	229.414	245.351
Timor Tengah Utara	119.563	118.170	129.065
Belu	83.908	86.992	81.643
Alor	83.597	81.831	85.541
Lembata	57.937	57.242	62.200
Flores Timur	100.824	100.136	106.531

Sikka	136.992	135.471	133.070
Ende	96.650	101.405	99.010
Ngada	70.595	73.635	79.728
Manggarai	131.341	133.299	133.594
Rote Ndao	85.963	89.916	90.560
Manggarai Barat	131.191	122.214	140.051
Sumba Tengah	34.565	34.659	39.059
Sumba Barat Daya	157.624	170.138	161.023
Nagekeo	70.276	67.268	71.847
Manggarai Timur	160.896	163.333	166.510
Sabu Raijua	48.111	45.479	50.806
Malaka	72.755	76.017	76.427
Kota Kupang	2.285	2.204	1.591
<b>NTT</b>	<b>2.198.777</b>	<b>2.235.420</b>	<b>2.317.375</b>

Sumber: BPS Provinsi NTT

Pada Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah tenaga kerja di Provinsi NTT terus mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir yakni tahun 2020 hingga 2022. Peningkatan jumlah tenaga kerja ini disebabkan oleh adanya penambahan angkatan kerja setiap tahunnya. Perkembangan jumlah penduduk usia produktif dalam jumlah besar mampu menciptakan peningkatan jumlah tenaga kerja yang tersedia dan pada akhirnya dapat meningkatkan produksi output di suatu wilayah. Akan tetapi disalah satu sisi penambahan tenaga kerja ini tanpa diimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan maka akan menjadi beban dalam pembangunan ekonomi dimana semakin besar penyerapan tenaga kerja maka akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan dikarenakan banyak penduduk yang bisa mampu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, begitupun sebaliknya semakin kecil penyerapan tenaga kerja maka akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan menurun.

Produk Domestik Regional Bruto di provinsi NTT juga dipengaruhi oleh belanja modal. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02,

belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang bermanfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender (PP No. 71, 2010). Belanja modal daerah diukur dari total pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Semakin besar belanja modal daerah yang produktif maka semakin tinggi tingkat perekonomian suatu daerah (Wibisono, 2003).

Belanja Modal akan meningkatkan kapasitas produksi dan kesempatan kerja baru, yang pada tahap selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi (Adrian Sutawijaya, 2010). Secara teori peningkatan belanja modal akan mendorong volume perdagangan dan volume produksi yang selanjutnya akan memperluas kesempatan kerja yang produktif dan berarti akan meningkatkan pendapatan perkapita sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh pada BPS Provinsi NTT menunjukkan bahwa Pengeluaran atau belanja modal setiap kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 sampai 2022 berbeda-beda. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.3**  
**Alokasi Belanja Modal Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur**  
**Tahun 2020-2022 (Dalam Ribuan Rupiah)**

Wilayah	Alokasi Belanja Modal		
	2020	2021	2022
Sumba Barat	141 940 434	116.870.829,00	142.909.584
Sumba Timur	136 547 446	137.721.799,00	236.725.660
Kupang	120 630 115	153.328.335,00	156.137.334
Timor Tengah Selatan	218 800 559	153.521.108,00	181.688.374
Timor Tengah Utara	109 024 988	101.803.584,00	163.384.456
Belu	212 963 338	93.601.753,00	85.270.395
Alor	184 474 428	192.289.964,00	172.918.278
Lembata	160 503 350	125.779.947,00	249.758.103
Flores Timur	133 408 898	139.351.796,00	96.101.526
Sikka	93 001 041	126.329.007,00	191.918.117
Ende	187 276 054	139.827.055,00	152.504.911
Ngada	71 853 958	133.515.611,00	111.116.200
Manggarai	206 921 382	174.222.039,00	169.206.541
Rote Ndao	127 698 587	105.810.657,00	156.236.433
Manggarai Barat	174 969 249	162.697.188,00	493.263.440
Sumba Tengah	10 949 991	95.596.352,00	135.235.791
Sumba Barat Daya	144 107 965	141.776.329,00	144.594.598
Nagekeo	117 443 332	177.034.170,00	113.999.290
Manggarai Timur	180 154 629	243.476.296,00	182.084.491
Sabu Raijua	152 480 443	119.311.564,00	137.023.274
Malaka	77 981 322	159.091.130,00	137.291.124
Kota Kupang	262 038 465	141.344.228,00	122.157.599

Sumber: BPS Provinsi NTT

Berdasarkan Tabel 1.3 menunjukkan bahwa total belanja modal setiap kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020 sampai 2022 berbeda antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya yang disebabkan oleh perbedaan Pendapatan Asli Daerah, penerimaan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil yang berbeda. Semakin besar anggaran yang dikeluarkan oleh suatu kabupaten dalam melakukan belanja modal maka penyediaan fasilitas pelayanan publik guna

menunjang perekonomian semakin baik sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, begitu juga sebaliknya. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Harianto dan Adi (2007) bahwa tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas diberbagai sektor tersebut, produkifitas masyarakat pun menjadi semakin tinggi dan pada akhirnya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi

Dengan demikian maka berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tenaga Kerja dan Belanja Modal Terhadap PDRB di Provinsi Nusa Tenggara Timur”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah tenaga kerja ( $X_1$ ) berpengaruh terhadap PDRB (Y) di Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Apakah belanja modal ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap PDRB (Y) di Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Apakah tenaga kerja ( $X_1$ ) dan belanja modal ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap PDRB (Y) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh tenaga kerja ( $X_1$ ) terhadap PDRB (Y) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh belanja modal ( $X_2$ ) terhadap PDRB (Y) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.



3. Untuk mengetahui pengaruh tenaga kerja ( $X_1$ ) dan belanja modal ( $X_2$ ) terhadap PDRB ( $Y$ ) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi penentu kebijakan, diharapkan penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan angkatan kerja, belanja dan pengeluaran pemerintah.
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan dengan memberikan bukti adanya temuan empiris bahwa analisis angkatan kerja dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Provinsi Nusa Tenggara Timur.